

## KEIN: keadilan ekonomi semakin masif

Minggu, 30 Desember 2018 17:46 WIB

<https://www.antaraneews.com/berita/782447/kein-keadilan-ekonomi-semakin-masif>



*DISKUSI PEMIKIRAN MA'RUF AMIN* Direktur Eksekutif Megawati Institute (MI) Arif Budimanta (kedua kanan) bersama mantan Ketua KPPU Syarkawi Rauf (tengah) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kedua kiri) menghadiri diskusi terkait pemikiran KH Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

(ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

***Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia menunjukkan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan.***

Jakarta (ANTARA News) - Arif Budimanta, ekonom yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), mengatakan di tiap program kerja yang ada, Presiden Joko Widodo selalu berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Apa yang telah dilakukan pemerintah menjadi bukti bahwa keadilan dan keberpihakan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah dan itu harus tetap dilanjutkan untuk memperteguh komitmen kebangsaan baik di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya," ujar Arif lewat keterangannya di Jakarta, Minggu.

Arif menjelaskan program-program kerja yang digelontorkan selama ini memiliki dua orientasi baik terhadap akses maupun aset di seluruh aspek kehidupan.

Pertama ialah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP dinilai telah memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari

keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.

Selanjutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional dengan jumlah kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017 (Kementerian Kesehatan). JKN memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus didorong oleh pemerintah. Di sisi lain pelayanan kesehatan juga semakin mudah diakses. Keduanya menjadi penting untuk membangun negara," ucap Arif.

Pemerintah, sambungnya, juga memfokuskan terciptanya keadilan sosial di wilayah Timur Indonesia, baik itu di pedalaman atau di wilayah perbatasan Indonesia.

Misalnya, ujar dia, dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pemerataan pembangunan.

Dalam kepemimpinan Jokowi, tambah Arif, pemerintah terus membangun jalan nasional seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pos lintas batas negara di batas- batas terluar wilayah Indonesia.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 107.958 km dan irigasi sebanyak 25.905 Ha melalui program Dana Desa.

"Tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mendorong peradaban di luar Pulau Jawa, pemerintah juga terus melakukan pemerataan di wilayah Timur Indonesia yakni melalui kebijakan satu harga BBM. Baru kali ini terjadi, sebelumnya di sana selalu lebih mahal dibandingkan dengan wilayah Barat," tuturnya.

Selain keadilan terhadap akses, pemerintah juga menjunjung keadilan terhadap aset melalui program Reforma Agraria, yang bertujuan mendistribusikan 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar kepada rakyat. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada 2017 5 juta sertifikat tanah telah diterbitkan.

Arif melanjutkan program-program itu telah memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia tercermin dari berbagai capaian yang telah diraih selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi. Pertama ialah kian menurunnya tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 berada di posisi 9,82 persen dan merupakan angka terendah sepanjang sejarah. Posisi tersebut turun 1,24 poin dari posisi September 2017 yakni sebesar 10,12 persen.

Penurunan kemiskinan itu juga dibarengi dengan melandainya tingkat ketimpangan, yang ditandai dengan turunnya indeks gini rasio dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,391 pada September 2017.

"Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia menunjukkan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan," tuturnya.

Selain angka kemiskinan yang terus menurun, pemerintah pun berhasil menjaga inflasi umum di angka 3 persen dari 2015 hingga 2017. BPS mencatat inflasi umum selama rentang tiga tahun tersebut ialah 3,35 persen, 3,02 persen, dan 3,61 persen.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta

Editor: M Razi Rahman